

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

Miftakur Rohmad

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : miftakur18@gmail.com

As'ad Isma

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : asadisma@uinjambi.ac.id

Fauzan Ramli

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : fauzanramli@uinjambi.ac.id

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Abstract. *Performance measurement is very important to assess how well organizations and managers are in providing more public services, and not just the ability to show that public money has been spent but includes the ability to show that the money has been used fairly, for the welfare of society. Then, from the background above, this study aims to analyze how the Bakeuda Financial Performance of the Tebo Regency Government in 2017-2021 is seen from: (1) Independence Ratio, (2) Efficiency Ratio (3) Harmony Ratio (operational expenditure and capital expenditure). This study uses a quantitative descriptive analysis method, which is a scientific and systematic study of the parts and phenomena and their relationships. Quantitative analysis is used to solve problems that are measuring quality in the form of (amount and number). The results of the performance analysis show that the Tebo Regency Government's Bakeuda finances are seen from (1) the Regional Financial Independence Ratio, the relationship pattern is still classified as an instructive relationship pattern because the average size of this ratio is 9.78% (2) The Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be quite efficient because the average regional financial efficiency of Blora Regency is 88.26% (3) The compatibility ratio is known that the average regional operational expenditure is still very high, namely 56.35% compared to the average capital expenditure of 39.92%, so it can be said Regional Government still pays little attention to regional development.*

Keywords: *Analysis of Regional Government Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio*

Abstrak. Pengukuran Kinerja sangat penting untuk menilai seberapa baiknya organisasi dan manjer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, dan bukan hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang tersebut telah digunakan secara

adil, demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kinerja Keuangan Bakeuda Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017-2021 dilihat dari: (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efisiensi (3) Rasio Keserasian (belanja operasional dan belanja modal). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kualitas berupa (jumlah dan angka). Hasil dari analisis Kinerja menunjukkan keuangan Bakeuda Pemerintah Kabupaten Tebo dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 9,78% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 88,26% (3) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasional daerah masih sangat tinggi yaitu 56,35% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 39,92% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian

LATAR BELAKANG

Dalam otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah. Keempat elemen tersebut adalah desentralisasi politik, derajat desentralisasi, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Penyerahan sumber keuangan daerah baik dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat dan daerah.

Maka pada pengelolaan dana daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, merupakan aktivitas yang terukur dari suatu entitas dalam periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kinerja merupakan aktivitas yang terukur dari suatu entitas dalam

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan suatu pekerjaan, Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara merupakan imbas system ekonomi yang dilaksanakan pada suatu lembaga keuangan serta dari perkembangan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan. Cita-cita dari setiap daerah atau suatu negara tentunya berkeinginan memilikipertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena gambaran dari tingginya pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan suatu daerah memiliki nilai positif dalam target keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan akan menjadi sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Perkembangan lembaga keuangan Islam pada saat beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan, hal ini tentunya didukung oleh beberapa factor yang menyebabkan perkembangan yang begitu tinggi diantaranya adalah georafii, teknologi, budaya, idiologi, bahasa yang satu sama lain saling mendukung.

Menurut Halim menjelaskan bahwa ciri-ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan ketergantungan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dan masih banyak potensi-potensi daerah yang sementara ataupun belum dikembangkan padahal itu juga merupakan sumber penghasilan daerah dan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal dalam hal ini semua yang berkenaan dengan potensi daerah itu sendiri.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang pertama dihadapi Kabupaten Tebo yaitu masihnya ketergantungannya kepada subsidi dari pemerintah pusat yang mencerminkan dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran Pemerintah daerah dan yang kedua yaitu kurangnya kemampuan daerah untuk mengali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang relatif kecil dari penerimaan daerah, dan permasalahan terakhir yaitu kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan mengali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan untuk sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja khususnya keuangan Pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Tebo, karena itu Pemerintah Kabupaten Tebo yang disertai menjalankan roda Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pengelolaan keuangan secara islam sudah diterapkan pada era Rasulullah, pengelolaan keuangan juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Prinsip islam tentang pengelolaan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Dalam Islam sendiri konsep anggaran negara bisa menggunakan konsep baitulmaal dengan sistem *balanced budget* atau sistem pengeluaran dan pemasukan yang seimbang. Pengeluaran anggaran pemerintah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan secara cermat, efektif dan efisien sehingga meskipun dalam sering terjadi peperangan anggaran negara tetap stabil. Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada pengelolaan keuangan harus secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan. Kebijakan negara dalam mencapai segala aspek tujuan kesejahteraan publik maupun non publik haruslah berjalan secara seimbang.

Permasalahan paling banyak juga ditemukan pada sektor retribusi pajak daerah yang memang pengelolaannya masih kurang maksimal. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Tebo melalui dinas terkait terus mengupayakan perbaikan, namun lemahnya sumber daya manusia yang mengelola membuat penataan aset semakin rumit.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

Pengelolaan asset daerah pada dasarnya adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Sehingga ciri utama daerah otonomi adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan dari daerahnya sendiri, gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah memberikan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini menggunakan teknik atau cara tertentu yang benar agar kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menilai kinerja keuangan. Pada laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tebo bisa dilihat dari PAD dari tahun 2019-2021 pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tebo, 2019-2021
Jenis Penerimaan (ribu rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2019	2020	2021
1.	Pajak daerah	26.218.319	19.173.168	17.649.500
2.	Retribusi daerah	3.226.061	3.017.427	4.658.000
3.	Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.680.580	8.221.154	7.000.000
4.	Lain-lain PAD yang sah	47.071.413	48.047.676	47.817.968
	Pendapatan Asli Daerah	83.236.373	78.459.425	77.125.468
	Realisasi Pendapatan Daerah	1.157.280.008	1.085.601.955	1.038.176.777
	Dana Perimbangan	842.319.739	756.063.831	748.172.145
1.	Bagi Hasil Pajak	31.877.536	23.471.010	31.877.536
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	56.981.825	58.629.557	58.838.592
3.	Dana Alokasi Umum	598.297.279	534.449.531	546.836.312
4.	Dana Alokasi Khusus	598.297.279	139.513.733	110.619.705
5.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	231.723.896	251.078.699	212.879.164
	Jumlah/Total	1.229.105.247	1.158.200.271	1.108.176.777

Sumber: bps.go.id

Dilihat dari tabel data diatas bahwa PAD Kabupaten Tebo dari tahun 2019 sebesar 6,77% dan terus mengalami kenaikan sebesar 6,95% ditahun 2021, tetapi masih tergolong dalam nilai rendah dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dari tahun 2019 sebesar 68,53% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2021. Ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo masih memerlukan bantuan besar dari pemerintahan pusat dan ini menunjukkan bahwa kabupaten tebo belum cukup mandiri dalam menetapkan penerimaan daerah. Komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan pendapatan PAD di Kabupaten Tebo. Semakin banyak pajak dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun, dengan harapan dapat menjadikan warganya lebih sejahtera. Bagi warga Kabupaten Tebo sebagai pembayar pajak, sesungguhnya pajak itu bukanlah beban, namun tanggungjawab alamiah.

Tabel 1.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tebo, 2019-2021
Jenis Pengeluaran (ribu rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021
A.	Belanja Tidak Langsung	593.653.672	729.752.701	701.211.892
1.	Belanja Pegawai	396.705.632	410.736.731	445.282.212
2.	Belanja Bunga	-	-	-
3.	Belanja Subsidi	4.309.236	3.510.000	1.70.514
4.	Belanja Hibah	7.039.780	7.427.600	73.386.982
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
6.	Belanja Bagi Hasil	2.063.964	2.143.900	2.211.900
7.	Belanja Keuangan	182.519.046	187.240.069	177.260.284
8.	Biaya Tidak Terduga	1.016.014	118.649.401	5.000.000
B.	Belanja Langsung	526.181.902	347.816.458	399.464.885
1.	Belanja Pegawai	45.374.582	50.815.476	-
2.	Belanja Barang Jasa	211.713.629	201.263.040	250.062.720
3.	Belanja Modal	269.093.691	95.737.942	149.402.165
Total		1.229.105.247	1.158.200.271	1.108.176.777

Sumber: bps.go.id

Dilihat dari tabel diatas pengeluaran belanja tidak langsung kabupaten tebo menunjukkan ditahun 2019 sebesar 48,29% dan pengeluaran belanja langsung sebesar 42,81%. Dan terus mengalami kenaikan pengeluaran belanja tidak langsung sampai tahun 2021 sebesar 63,27%, tabel diatas cukup membuktikan bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tebo lebih besar dari pada pendapatan asli daerah (PAD) masih belum adanya skala prioritas pembangunan dalam penyusunan anggaran,serta sistem pengeluaran yang belum efisien.

Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Tebo tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral provinsi jambi,sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

social ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan pada pertanian, industri, perdagangan dan jasa. dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengolah keuangan yang baik saat merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. daya manusia adalah pegawai yang siap, mampudan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadap pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Oleh karna itu dimana teknologi dan peradaban sudah semakin maju, menuntut sumber daya manusia yang kompeten yang semangat dan disiplin.

Maka Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melakukan Pemerintahan baik dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan sehingga tercipta Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah daerah harus pandai mengatur dan mengelola laporan keuangannya dengan jelas tanpa ada ketidak pastian dalam mengelola laporan keuangan dan menyelenggarakan Pemerintahan sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan Pemerintah yang baik serta adanya evaluasi laporan keuangannya yang berkala atas peningkatan daerah, sehingga dapat dinilai apakah meningkat atau menurunnya Pemerintahan Daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dar berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apayang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila diuraikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja).

Kinerja keuangan juga sebagai untuk menilai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat.

Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dibutuhkan menganalisa laporan keuangan. Pada saat melakukan analisis laporan keuangan harus dilakukan secara efektif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Terhadap beberapa hal yang harus diamati pada saat melakukan analisis laporan keuangan.

Pada saat menganalisis laporan keuangan sering dilakukan dengan membandingkan komponen antar laporan keuangan. Dengan demikian, hubungan antar laporan keuangan. Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan.

Analisis Kinerja Keuangan daerah

Untuk menganalisis kinerja keuangan dibutuhkan laporan yang memuat informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Maka dalam laporan keuangan rasio adalah suatu angka yang

menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya, dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58 Tahun 58 Tahun 2005 antara lain kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah, kemudian kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga. Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keuangan daerah merupakan hak semua dan kewajiban daerah dalam rangka melaksanakan pemerintah daerah agar dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengolahan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penataan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan dalam pemerintah daerah.

Perspektif Keuangan Islam

Keuangan menurut perspektif Islam adalah bentuk keuangan yang di dasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Karena itu, syariah lebih dari sekadar perangkat aturan-aturan hukum. Sejatinya syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum. Ruang lingkup keuangan islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang atau dan, hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengolah dan menginterpretasikan data yang memperoleh sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan pemerintah daerah dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan wilayah Kabupaten Tebo dikantor BAKEUDA yang berlokasi di: Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Tebo – Bungo Km.12, Muara Tebo.

Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2022.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana metode sumber data dengan mengumpulkannya dengan data sekunder.

Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga dengan melihat data sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian, data sekunder adalah data-data yang bersumber dari arsip-arsip atau dokumen penting Negara dan literature-literature pustaka lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

Populasi Dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian ini, dan populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan informasi data keuangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah, yang kemudian akan diteliti lebih lanjut.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Karena terdapat banyak Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia, maka peneliti memusatkan penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan yang diambil dari penulis yaitu sampel selama lima tahun terakhir (2017-2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Tebo sebesar Rp.68.406.048.618 Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp. 72.822.004.43. Dan pada tahun 2019 PAD Kabupaten Blera mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 83.236.373.476. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp.78.459.425.924. Dan kembali lagi mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.77.125.468.378 dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 780.757.472.334, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 789.619.787.521. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 842.319.739.634, naik dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami penurunan sebesar atau menjadi Rp. 729.619.317.334 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 748.172.145.780. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari provinsi pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. kemampuan keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada

kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berawal pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 8,76%, kemudian naik menjadi 9,22% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian sebesar 9,88% kemudian naik kembali pada tahun 2020 sebesar 10,75%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 10,30%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tebo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Maka Kemandirian Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tebo sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 dan 2020 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp. 949.347.996.567, naik menjadi Rp. 1.046.604.823.451, pada tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 935.934.567.028. Dan kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 810.557.897.553, pada tahun 2020, kembali naik pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.103.676.777.314.

Total pendapatan daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2021 dimana terjadi penurunan realisasi pendapatan. Berawal dari tahun 2017 total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.014.817.014.876. Mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.036.923.145.443 pada tahun 2018. Kembali naik pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.157.280.008.512, naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2020 naik sebesar menjadi Rp. 1.170.754.754.654. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.140.667.435.987.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 88,26% atau dapat dikatakan curang efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 93,54%, kemudian tahun 2018 menjadi 100,93%, tahun 2019 sebesar 80,87%, tahun 2020 sebesar 69,23%, dan tahun 2021 sebesar 96,75%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang tergolong curang efisien karena rata-rata rasionya 88,26% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih kecil dari pada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2018 tersebut Pemerintah Kabupaten Tebo sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Tebo dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

c. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dan 4.7 dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp.1.023.078.134.564 , naik menjadi Rp.1.079.279.606.294 pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.229.105.347.677. pada tahun 2020 naik kembali Rp. 1.301.266.652.087, kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.516.869.911.443.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri selalu terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Masing-masing sebesar : Rp.546.766.019.235, Rp. 574.203.748.955, Rp. 593.653.672.774, Rp. 729.752.701.675, dan Rp. 1.053.906.158.105. Sedangkan Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada tahun 2021 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 4.6 dan 4.7 itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2017 Rasio Belanja Operasinya sebesar 53,44% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 53,20%, kemudian naik kembali pada tahun 2019 menjadi 57,56%, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 48,10%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 69,47%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 56,35%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2017 sebesar 41,13% naik menjadi 44,09% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019, 2020, 2021 yaitu sebesar 42,81%, 41,29% dan 30,28%. sehingga rata-rata rasionya sebesar 39,92%

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

pegawai . Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk kebutuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada prioritas yang pasti untuk menggunakan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada kebutuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Tebo kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati oleh publik. Dan pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

d. Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo Dalam Maqashiq Syariah

Dalam konsep *maqashid syariah* tidak hanya dikaitkan dalam kehidupan pribadi tetapi juga sudah menyangkut kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya *maqashid syariah* dimungkinkan tidak akan sama dengan *maqashid syariah* yang ada pada tata kelola pemerintahan. Meskipun tidak sama baik dari ranah pribadi dan pemerintahan tetap menunjukkan interkoneksi, meskipun tidak sama realisasi belanja daerah terwujud dalam bentuk saling dapat dioperasikan.

Beberapa kesimpulan yang ada dalam penelitian ini adalah dalam pemberdayaan anggaran dalam tata kelola pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo dinilai lebih banyak mengarahkan anggaran daerah dan belanja daerahnya dalam pos-pos yang belum sepenuhnya diintegrasikan dengan *maqashid syariah* dalam penggunaan anggaran sejalan dan memosisikan anggaran yang berbasis *maqashid*. Dilihat dari hasil diatas bahwa keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo pendapatan masih rendah dan pengeluaran daerah masih cukup besar, Pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur keuangan sehingga bisa menjaga sumber pendapatan dan melindungi pengeluaran sesuai dengan kaidah syariah. Kemudian Pemerintah harus cukup adil dalam mengelola sumber pendapatan yang ada di daerah sebagaimana dengan unsur-unsur dalam *maqashid syariah* yaitu salah satunya keadilan dalam mengelola anggaran maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan dalam kebijakan belanja keuangan publik, efisiensi dan keserasian belanja merupakan pokok kebijakan pengeluaran pemerintah.

Kemudian dalam tujuan *maqashid syariah* keadilan Pemerintah Kabupaten Tebo haruslah adil dalam masyarakat islam harus adil baik urusan sesama kaum muslim maupun non muslim. Tujuannya adalah untuk ditegakannya keadilan bersama karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan dalam hal ini islam memandang bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Dan tujuan selanjutnya yang paling utama dalam *maqashid syariah* adalah kemaslahatan yang akan dicapai, yang harus terdapat dalam hukum islam. Dan maslahat haruslah menyangkut semua kepentingan umum bukan kepentingan pihak tertentu agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebojika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola Instruktif. Hal ini berarti peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rasionya masing-masing sebesar 8,76%, 9,22%, 9,88%, 10,75%, dan 10,30%.
2. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 88,26% atau dikatakan cukup efisien. Berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rasionya masing-masing sebesar 93,54%, 100,93%, 80,87%, 69,23%, dan 96,75%.
3. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasional lebih besar dari dari belanja modal. Besarnya belanja operasional berada kisaran 48,10%-69,47% rata-rata sebesar 56,35. Untuk belanja modal berada pada kisaran 30,28%-44,09%, kemudian rata-rata sebesar 39,92%. Dilihat dari rasio keserasian belanja

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

operasional lebih besar dari pada belanja modal, sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tebo masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah, kemudian inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat penting dalam upaya peningkatan PAD. Pada peningkatan PAD bisa dengan dilakukannya dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Kemudian Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian ini yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Tebo. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Qur'an Terjemah Kemenag 2019 .Go.Id, n.d.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah Pentasihih Mushaf Al-Qur'an* (Bandung, 2005).

Buku

Abdul Helim, Maqosid Al-Syariah, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Hendara Karianga. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Inayati, Titik. "*Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam*" (2018).

Khusaini. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018.

Lailul Mursyidah, and Ilmi Usrotin Choiriyah. *Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah*. Umsida Press, 2020.

Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4th ed. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.

Mulia Andirfa. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Nasrifah, Maula. "*Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an & Hadits*" (2016).

Rosanna Purba. *Analisis Laporan Keuangan*. Sumatra Barat: PT Eksekutif Teknologi, 2023.

Sri Kusriyah. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Purwanto. *Penyusunan Instrumen*. 1st ed. Magelang: StaiaPress, 2018.

Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI(Anggota IKAPI), 2017).

Jurnal

Sari, Ifrita Indah, and Imawati Yousida. "Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 5, no. 1 (March 19, 2019).

Amin, Nurul. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Iqtishaduna* (2014).

Andriani, Wiwik, Desi Handayani, Roni Putra, and Dini Marisa. "Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting)." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (2021)

Aprilianda, Gusti Made Ayu, and Dr Candra Fajri Ananda. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur" (2014)

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

- Arifiansyah, Farhadi, Risma Ayu Kinanti, and Duta Bintang Fitriyah. "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 02 (2021)
- Daniel Frangky Sambow. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (2016).
- Farida, Ai Siti, and Raden Faisal Maulana Nugraha. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 2 (December 10, 2019)
- Farizky, David Al. "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran) 2015-2018)" (2018)
- Harahap, Heri Faisal. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (March 19, 2020)
- Karlina, Anis, and Nur Handayani. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (2017).
- Nasution, Hamni Fadlilah, and M Pd. "Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif" (2012.).
- Prihantoro, Agung. "Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen." *Jurnal. unimus* 8 (2012)
- Yani, Akhmad, and Zulkarnain Zulkarnain. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak." *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (July 30, 2020)
- Zainur, Zainur. "Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020).
- Firman Muhammad Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): hlm 72.